

**KONFLIK TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT  
DI NAGARI KINALI KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
(Studi Kasus: Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat  
Kinali Dengan PT LIN)**

**SKRIPSI**



Oleh

**VINI OKTIANI**

**BP. 2010822021**

**DEPARTEMEN ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2025**

**KONFLIK TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT  
DI NAGARI KINALI KABUPATEN  
PASAMAN BARAT  
(Studi Kasus: Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat  
Kinali Dengan PT LIN)**

**SKRIPSI**

**Tugas Akhir untuk Mencapai Gelar Sarjana Antropologi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas**



**Pembimbing I: Fajri Rahman, M.A  
Pembimbing II: Prof. Dr. Zainal Arifin, M. Hum**

**DEPARTEMEN ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2025**

## ABSTRAK

**VINI OKTIANI (2010822021). “Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus: Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kinali Dengan PT LIN)”. Pembimbing I Fajri Rahman, M.A dan Pembimbing II Prof. Dr. Zainal Arifin, M. Hum, Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.**

Konflik tanah ulayat merupakan salah satu konflik yang pernah terjadi di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Konflik ini menimbulkan permasalahan antara kelompok masyarakat adat Kinali baik itu masyarakat Anam Koto maupun masyarakat Langgam dengan PT LIN. Permasalahan ini berawal dari penyerahan tanah ulayat kepada Bupati Pasaman oleh *ninik mamak* Kinali yang nantinya diberikan kepada investor atau perusahaan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) sebagai hak pengusahaan terhadap kegiatan perkebunan. Konflik ini semakin rumit karena perbedaan pemahaman antara prinsip adat “*adat diisi limbago dituang*” dan hukum negara terkait kepemilikan tanah. Konflik tanah ini menunjukkan pentingnya peran tanah dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sebagai identitas budaya. Konflik ini sudah terjadi sejak 1989, dan masih berlangsung hingga saat ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling* dengan kriteria-kriteria khusus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dengan observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data, mereduksi data, dan menyajikan data dalam bentuk pembahasan. Penelitian ini menggunakan teori perlawanan dari James Scott.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa tanah ulayat yang muncul akibat perbedaan pemahaman antara masyarakat adat kinali dan perusahaan terhadap tanah ulayat dan penyerahan tanah ulayat tersebut. Penyerahan tanah yang dilakukan tersebut lambat laun tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang menimbulkan beberapa konflik diantara masalah letak tanah dan belum terpenuhi hak masyarakat adat Kinali. Ketidaksesuaian tersebut sehingga menimbulkan perlawanan. Perlawanan yang muncul menuntut tanah ulayat mereka dikembalikan dan tuntutan plasma 20% dari lahan yang dikelola. Perlawanan ini sebagai bagian dari usaha masyarakat adat Kinali dalam upaya memperjuangkan hak mereka terhadap tanah ulayat yang dikelola oleh perusahaan. Perlawanan yang dilakukan terbagi menjadi perlawanan terbuka yaitu dengan masyarakat menuntut hak dengan cara melakukan unjuk rasa hingga melapor ke berbagai pihak dan melakukan perlawanan tertutup seperti gosip sebagai bentuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap situasi yang sedang terjadi.

**Kata Kunci : Konflik, Tanah Ulayat, Masyarakat, Perusahaan**

## ABSTRAK

**VINI OKTIANI (2010822021). "Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus: Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kinali Dengan PT LIN)". Pembimbing I Fajri Rahman, M.A dan Pembimbing II Prof. Dr. Zainal Arifin, M. Hum, Jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.**

Communal land conflict is one of the conflicts that has occurred in Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. This conflict caused problems between the community groups masyarakat adat Kinali, both the masyarakat Anam Koto and masyarakat Langgam, and PT LIN. This problem started with the handover of customary land to the Regent of Pasaman by *ninik mamak* Kinali which was later given to investors or companies in the form of Business Use Rights (HGU) as exploitation rights for plantation activities. This conflict is increasingly complicated due to differences in understanding between the customary principle "adat diisi limbago dituang" and state law regarding land ownership. This land conflict shows the important role of land in the lives of the Minangkabau people as a cultural identity. This conflict has occurred since 1989, and is still occurring today.

This research uses a qualitative method with a case study approach. The selection of informants was carried out using purposive sampling with special criteria. Data collection techniques were carried out using observation, in-depth interviews, documentation studies and literature studies. The data obtained is then analyzed by preparing and organizing the data, reducing the data, and presenting the data in the form of a discussion. This research uses James Scott's theory of resistance.

The results of this research indicate that customary land disputes arise due to differences in understanding between the masyarakat adat Kinali and the company regarding customary land and the handover of that customary land. The land handover that was carried out gradually did not meet the community's expectations, which gave rise to several conflicts between the issue of land location and the rights of the masyarakat adat Kinali. This discrepancy gives rise to resistance. The resistance that emerged demanded that their customary land be returned and plasma demands 20% of the managed land. This resistance is part of the Kinali indigenous community's efforts to fight for their rights to customary land managed by the company. The resistance carried out is divided into open resistance, namely by the community demanding rights by holding demonstrations and reporting to various parties and carrying out closed resistance such as gossip as a form of expressing their dissatisfaction with the current situation.

**Keywords: Conflict, Customary Land, Community, Company**